

PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL YANG BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DENGAN GOTONG ROYONG SEBAGAI PONDASI KEAMANAN NEGARA

Materi Forum Group Discussion (FGD)

"Optimalisasi Program Ketahanan Pangan (Food Estate) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Dalam Rangka Keamanan Nasional."

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Tahun 2023

SATRIO F. DAMARDJATI, SP.

KETUA UMUM PETANI
PIMPINAN UMUM www.petani.id
INISIATOR PETANI GO DIGITAL





LATAR BELAKANG

- Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang mempunyai iklim tropis dengan keanekaragaman hayati yang paling besar di dunia. Negara kepulauan ini mempunyai keanekaragaman hayati yang ada di daratan dan perairan, baik berupa tumbuhan maupun hewan. Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) menyadari bahwa potensi sumberdaya hayati yang tinggi ini, semestinya Indonesia dapat berperan dalam penanganan krisis pangan karena dampak perubahan iklim yang telah digambarkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agricultural Organization, FAO) pada tahun 2009.
- Pendayagunaan lahan dan laut di Indonesia harus ditingkatkan tidak saja untuk mengatasi dampak perubahan iklim, tetapi Indonesia dapat mengembangkan peran sebagai lumbung pangan dunia. Oleh karenanya, pemanfaatan lahan-lahan yang dimiliki oleh Negara dan masyarakat, harus menjadi lahan produktif. Untuk menjadi lumbung pangan dunia, Indonesia harus mempunyai sebuah langkah strategis yang menggerakkan seluruh sumberdaya nasional untuk melakukan fungsi dan peran secara menyeluruh, lintas-sektoral, dan kooperatif pada pengelolaan produksi dan produktifitas pangan di seluruh Indonesia.
- Posisi Indonesia dalam Indeks Ketahanan Pangan Global 2020 (Global Food Security Index 2020) turun dari posisi 62 ke posisi 65, dari total 113 negara. Negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam berada di posisi 20, 43, 51 dan 63. Turunnya posisi Indonesia dalam indeks ini mencerminkan masih perlunya upaya keras untuk mencapai ketahanan pangan. Terlebih lagi di masa pandemi Corona yang sudah berlangsung hampir satu setengah tahun telah melemahkan perputaran roda ekonomi masyarakat Indonesia kelas bawah yang akhirnya mempengaruhi terjadinya penurunan ketahanan pangan.



RUMUSAN PERSOALAN PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL

- 1. Belum sinkronnya regulasi yang mengatur tata letak, kepemilikan dan pengelolaan serta alih fungsi lahan?
- 2. Masih rendahnya tata kelola terkait pengembangan food estate kriteria budidaya, seperti SDM, lingkungan tumbuh, agronomi, fasilitas produksi?
- 3. Belum terbangunnya infrastruktur (irigasi, transportasi dan energi) yang optimal dalam pengembangan *food estate*?



RUMUSAN PERSOALAN PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL

Tata letak, kepemilikan dan pengelolaan serta alih fungsi lahan?

- > Kementerian LHK
- Kementerian Pertanahan ATR



- > Kementerian BUMN
- > Kementerian ESDM

Infrastruktur
(irigasi, transportasi
dan energi) yang
optimal dalam
pengembangan food
estate

> Kementerian Pertahanan

- **Kementerian Pertanian**
- **➤** Kementerian Perdagangan
- **Kementerian BUMN**
- Badan Pangan Nasional
- Badan Riset Inovasi Nasional

Tata kelola terkait pengembangan food estate kriteria budidaya, seperti SDM, lingkungan tumbuh, agronomi, fasilitas produksi?



LANDASAN PANGAN NASIONAL





UU 23 / 2014

UU 18 / 2012

tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Pangan
: pemerintah daerah provinsi,
kabupaten / kota bertanggung
jawab untuk melaksanakan
pengembangan cadangan
pangan pemerintah

tentang Pangan, pasal 23 : dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas :

- cadangan pangan pemerintah
- cadangan pangan pemerintah daerah
- cadangan pangan masyarakat

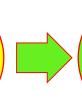
Sumber: https://petani.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2012-tentang-pangan/



UU CIPTA KERJA TERKAIT PANGAN

Alih fungsi lahan dapat dibendung

Petani atau kelompok Petani diberikan kemudahan untuk mengurus perizinan usaha UU CIPTA KERJA TERKAIT PANGAN



Terdapat ruang meningkatkan kesejahteraan Petani



Gratis sertifikasi halal bagi hasil produksi pertanian

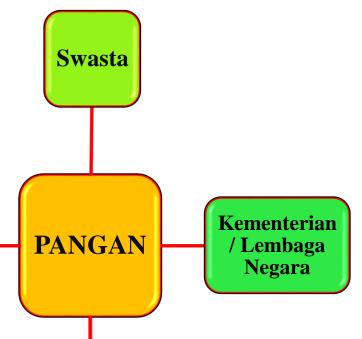
Sumber:

- https://politik.rmol.id/read/2020/11/19/461952/petani -uu-cipta-kerja-akan-bendung-alih-fungsi-lahanpertanian-dan-tingkatkan-kesejahteraan
- https://nasional.sindonews.com/read/237532/15/uuciptaker-lindungi-lahan-dan-tingkatkankesejahteraan-petani-1605748304



PILAR PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL YANG BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

PETANI: Kelompok / Gabungan **Kelompok PETANI Tanaman** Pangan Kelompok / Gabungan **Kelompok PETANI Tanaman** Hortikultura Kelompok / Gabungan **PETANI Kelompok PETANI** Pembudidaya Peternakan Kelompok / Gabungan **Kelompok PETANI** Perkebunan Kelompok / Gabungan **Kelompok PETANI** Pembudaya Perikanan Darat



Kementerian / Lembaga Negara:

- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian PUPR
- Kementerian LHK
- > Kementerian ATR BPN
- Kementerian Perdagangan
- **Kementerian BUMN**
- > Kementerian ESDM
- Badan Pangan Nasional
- > Badan Riset Inovasi Nasional
- > Badan Karantina Indonesia

BUMN:

BUMN

BUMN Perbenihan, BUMN Pupuk, BUMN Peternakan, BUMN Perikanan, BUMN Perkebunan, BUMN Logistik, BUMN BULOG, BUMN Perbankan, BUMN Energi



STRATEGI PENANGANAN PERSOALAN PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL

- > Kementerian PUPR
- > Kementerian ESDM

Infrastruktur (irigasi, transportasi dan energi) yang optimal dalam pengembangan food estate



Tata Kelola Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional

Peta Jalan Program
Peningkatan Penyediaan
Pangan Nasional
berdasarkan Perpres

- **Kementerian Pertahanan**
- **Kementerian Pertanian**
- ➤ Kementerian Perdagangan
- > Kementerian BUMN
- > Badan Pangan Nasional
- Badan Riset Inovasi Nasional

Tata kelola terkait pengembangan food estate kriteria budidaya, seperti SDM, lingkungan tumbuh, agronomi, fasilitas produksi?

- > Kementerian LHK
- > Kementerian ATR BPN

Tata letak, kepemilikan dan pengelolaan serta alih fungsi lahan?



FAKTA PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL (FOOD ESTATE) MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

FAKTA

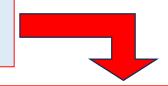
Pada tahun 2020, Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan – Dewan Pimpinan Nasional PETANI telah melakukan kajian bahwa cita – cita membuat food estate skala besar (lumbung pangan nasional) bukan cerita baru. Era Presiden Soeharto pernah mencanangkan lahan padi sejuta hektar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencetak Merauke (Papua) menjadi lumbung pangan; kebijakan yang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo juga. Kebijakan mengembangkan food estate sulit berhasil (seperti sudah ditunjukkan sejak zaman Presiden Soeharto). Ketimbang membangun lumbung pangan nasional, pemerintah semestinya mendorong pengenalan kembali lumbung pangan di setiap desa. Artinya: alih – alih mendukung usaha skala besar, pemerintah semestinya punya prioritas mendukung masyarakat Petani kecil di pedesaan. Karena Badan Pangan Dunia (FAO) mengakui peran besar Petani gurem. Sekitar 70% pangan dunia diproduksi oleh Petani keluarga (family farming). Di Indonesia sendiri, 96% kebutuhan beras dipasok oleh Petani gurem. Lebih dari itu, pertanian masih merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja di negeri ini: yakni 35% atau sekitar 40 juta orang pada 2013. Meski begitu, jumlah Petani memang turun terus, sekitar 1 juta Petani / tahun. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB juga terus merosot. Hanya sekitar 14% – 15% pada 2014. Padahal, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB pertanian paling efektif menghapus kemiskinan dibanding pertumbuhan sektor lain, seperti manufaktur dan jasa.

HARAPAN



BENARKAH PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL (FOOD ESTATE) GAGAL?

Program Food Estate gagal atau tidak dilihat dari target capaian pemerintah.



Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, lokasi awal pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) diarahkan di lima lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

KSPP diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian target-target pembangunan, terutama penguatan cadangan beras pemerintah hingga 1-1,5 juta ton beras, peningkatan produksi pangan tiga persen per tahun dan produktivitas pertanian, peningkatan ketersediaan beras hingga 46,8 juta ton pada 2024, target Nilai Tukar Petani 103-105, dan menghindari terjadinya degradasi atau kerusakan lahan.



Satrio F. Damardjati Ketua Umum Petani

Ir. Joko Widodo Presiden RI



4 ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Masalah kepemilikan lahan, Presiden menginstruksikan persoalan kepemilikan lahan di area food estate segera diselesaikan karena terkait area yang luas.

Pengembangan food estate, harus dihitung secara matang mengenai kejelasan siapa yang mengelola, tanaman yang akan dikembangkan, teknologi yang digunakan, serta pembiayaan. PROGRAM
PENINGKATAN
PENYEDIAAN
PANGAN
NASIONAL
(FOOD ESTATE)

Master plan pelaksanaan food estate, Presiden meminta rencana induk food estate segera dibentuk, sehingga seluruh aspek dapat dilihat dan diselesaikan.

Infrastruktur pendukung seperti akses jalan, sehingga peralatan pertanian modern yang ukurannya besar dapat masuk dengan mudah.



RENCANA AKSI FOOD ESTATE

Tempat penyimpanan bahan pangan : Kementerian Perdagangan (Resi Gudang) dan Kementerian BUMN melalui BUMN Pergudangan, PT. PPI, BULOG. Trasportasi: Kementerian BUMN

Tata Kelola Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional

Irigasi dan Bendungan : Kementerian PUPR

PETANI



Catatan: Cukup efektif mendukung produktivitas Petani, ada baiknya ada penambahan Pembangunan embung, bendungan dan jaringan irigrasi khususnya di Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate).



RENCANA AKSI PEMBIAYAAN / SUBSIDI BAGI PETANI

Kebijakan sektor keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam produksi pangan dikarenakan resiko-resiko produksi pangan yang tidak terhingga, terus meningkatnya harga input produksi pertanian dan ketergantungan yang akut atas input produksi itu. Sektor keuangan harus menciptakan stimulus pembiayaan yang secara bertahap dapat meningkatkan akuntabilitas produksi pangan, menguatnya daya inovasi pertanian dan kelautan, serta menciptakan para pelaku produksi pangan yang berbobot, bertanggung jawab dan secara kolektif dapat menciptakan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan produksi dalam perekonomian yang semakin menuntut daya saing. Dalam bentuk yang lebih besar, sektor keuangan Negara harus menciptakan regulasi sekaligus otoritas tertentu yang dikhususkan untuk pembiayaan produksi pangan, baik berupa Bank Pertanian maupun Bank Kelautan.

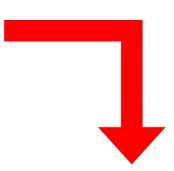




RENCANA AKSI TEKNOLOGI PENGEMBANGAN DAN STANDAR NASIONAL PRODUK PANGAN

Teknologi dalam pengembangan ketahanan pangan

Tata Kelola Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional Pemenuhan Standar Nasional Indonesia pada produk-produk Pangan





Teknologi tepat guna Badan Riset Inovasi Nasional



Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa, sistem informasi pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan, Badan Pangan Nasional berdasarkan data-data tersebut merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan bidang Kerawanan Pangan dan Gizi serta bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.



RENCANA AKSI TATA KELOLA KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN NASIONAL



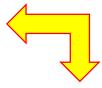
Peningkatan Produksi

Perpres Tata Kelola Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional

Peta Jalan Program
Peningkatan Penyediaan
Pangan Nasional
berdasarkan Perpres











Ket: Warung Petani - DPC Petani Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat (Dok: Bidang Propaganda & Jaringan - DPC Petani Kab. Kubu Raya)



REKOMENDASI DEWAN PIMPINAN NASIONAL PETANI Terkait Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional

Pemerintah konsisten menjalan program Food Estate sesuai arahan Presiden Joko Widodo dengan mulai membangun 7 kluster prioritas Lumbung Pangan:

- 1. Kluster Pangan (Food).
- 2. Kluster Pakan (Feed).
- 3. Kluster Pupuk (Fertilizer).
- 4. Kluster Ikan / Perikanan (Fish).
- 5. Kluster Buah / Hortikultura (Fruit).
- 6. Kluster Energi (Fuel).
- 7. Kluster Keuangan / Pembiayaan (Finance).





MATUR SEMBAH NUWUN



• Mobile / WA : 0818 – 0263 – 1968

• Email : <u>petani@petani.id</u>

• Twitter / X : @RioDamardjati

• FB : https://www.facebook.com/SatrioDamardjatiOfficial

• Web site : https://petani.id/

